
EFEKTIVITAS DANA DESA DILIHAT DARI TUJUAN PROGRAM

Oleh

Mujiyanto¹, Djamarel Hermanto², Lukman Yudho Prakoso³^{1,2,3} Universitas Pertahanan RIE-mail: ¹mujiyantobpkp@gmail.com, ²djamarel88@gmail.com,³lukman.prakoso@idu.ac.id

Article History:

Received: 21-02-2023

Revised: 12-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Keywords:Dana Desa, Tujuan Program,
Pemerintah

Abstract: Harapan pemerintah agar pembangunan dapat merata di seluruh wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah tujuan dari Undang – Undang tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dana desa dan mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan analisa perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persentase kemiskinan masyarakat di desa antara sebelum dan setelah adanya dana desa, dimana perbedaan yang terjadi berupa turunnya persentase kemiskinan dari tahun ke tahun sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pemerintah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Begitulah cita-cita pemerintah agar pembangunan tidak hanya terjadi di pusat saja, melainkan juga merata di berbagai wilayah, terutama wilayah timur dan daerah perbatasan. Dengan pembangunan yang merata tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mendukung cita-cita tersebut, pada tahun 2014 pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana peraturan tersebut yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program dana desa yang dikeluarkan pemerintah.

Salah tujuan dari UU No. 6 tahun 2014 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Selama tujuh tahun terakhir pemerintah telah mengucurkan dana desa dengan total

sebesar 401,7 Triliun guna membuktikan komitmennya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi semenjak program dana desa pertama kali dilaksanakan yaitu tahun 2015.

Dengan besarnya dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, tentunya program dana desa diharapkan bisa memenuhi cita-cita pemerintah dan tujuan yang diinginkan sesuai UU No. 6 tahun 2014 yaitu kesejahteraan masyarakat desa.

Jika kita gali lebih dalam, antara kemiskinan dan ketahanan nasional memiliki hubungan secara fungsional, yaitu kondisi dimana ketika penduduk suatu negara semakin miskin maka ketahanan nasionalnya akan menjadi semakin rentan, walaupun kemiskinan tersebut bukan penyebab langsung dalam kerentanan ketahanan nasional. (Sopian dkk, 2020). Atas persoalan tersebut, penulis tertarik untuk membahas efektifitas program dana desa dilihat dari tingkat kemiskinan.

LANDASAN TEORI

Dana desa

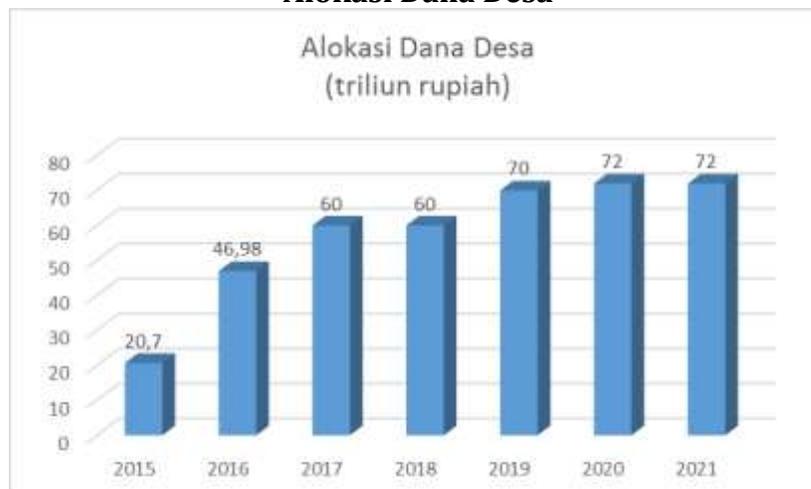
Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi desa di seluruh Indonesia.

Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga dana desa disalurkan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jumlah alokasi dana desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah alokasi dana desa selama tujuh tahun terakhir berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bisa kita lihat pada Gambar berikut.

Gambar 1
Alokasi Dana Desa



Sumber: DJPK, hasil olah data

Dari gambar tersebut di atas, bisa kita ketahui bahwa alokasi dana desa yang disiapkan oleh pemerintah pada umumnya meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi dana yang besar tersebut merupakan

Efektivitas dana desa

Untuk mengetahui efektivitas dari dana desa yang digunakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

- (1) kesesuaian manfaat, yaitu kondisi dimana dana desa yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa;
- (2) ketercapaian tujuan, yaitu dana desa dalam penggunaannya dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan utamanya tercapai;
- (3) ketepatan waktu, dalam proses penyaluran serta penggunaan dana desa, harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sampai berakhirnya kegiatan;
- (4) hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat. (Aziz, 2016)

Kemiskinan

Definisi kemiskinan menurut BPS, yaitu kondisi ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan serta yang memiliki pendapatan rata-rata perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan dapat menjadi tiga pengertian antara lain:

1. Kemiskinan absolut, seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
2. Kemiskinan relatif, seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural, sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. (Prawoto, 2009)

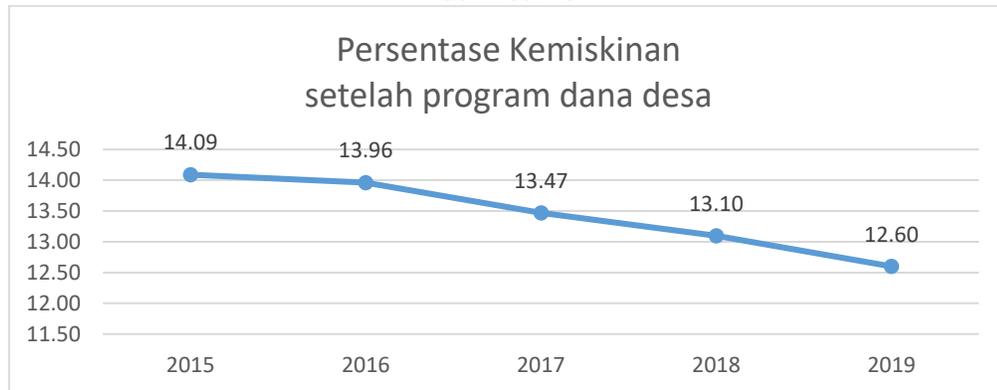
Persentase kemiskinan

Menurut BPS, Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah persentase penduduk kemiskinan yang diperoleh dari data BPS dalam Profil Kemiskinan di Indonesia disajikan dalam Gambar berikut:

Gambar 2



Gambar 3



METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisa perbandingan dan regresi sederhana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan (efektivitas) antara sebelum adanya program dana desa dan setelahnya, maka akan dilakukan uji beda atau paired sample t-test.

Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik selama 10 tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2019, dimana data tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 merupakan kondisi sebelum adanya program dana desa dan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setelah adanya program dana desa.

Data tahun 2020 dan 2021 tidak dimasukkan kedalam penelitian karena pada tahun tersebut merupakan kondisi tidak wajar akibat adanya pandemi COVID-19.

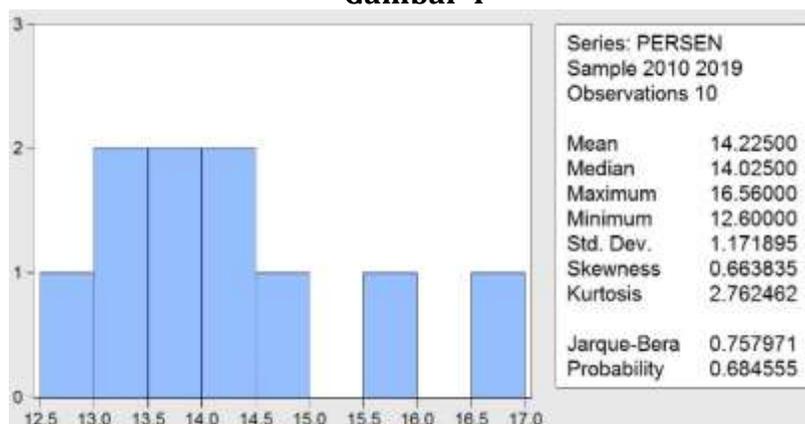
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas

Uji normalitas yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel dan mengetahui apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal. Suatu data dikatakan normal jika hasil angka probability lebih besar dari 0,05.

Hasil perhitungan uji normalitas terhadap persentase penduduk miskin dengan aplikasi Eviews disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4



Berdasarkan gambar di atas, bisa kita lihat bahwa nilai probability hasil pengujian sebesar 0,6845 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.

Uji beda atau paired sample t-test

Paired sample t-test adalah pengujian parametrik yang digunakan terhadap dua data berpasangan. Dimana tuuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari kedua data tersebut. Data yang diuji dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan jika nilai probability t-test nya lebih kecil dari 0,05.

Gambar 5

Test for Equality of Means of PERSEN
Categorized by values of KODE
Date: 10/28/22 Time: 22:56
Sample: 2010 2019
Included observations: 10

| Method | df | Value | Probability |
|-----------------------------|--------------|----------|-------------|
| t-test | 8 | 2.791860 | 0.0235 |
| Satterthwaite-Welch t-test* | 6.317663 | 2.791860 | 0.0298 |
| Anova F-test | (1, 8) | 7.794481 | 0.0235 |
| Welch F-test* | (1, 6.31766) | 7.794481 | 0.0298 |

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

| Source of Variation | df | Sum of Sq. | Mean Sq. |
|---------------------|----|------------|----------|
| Between | 1 | 6.099610 | 6.099610 |
| Within | 8 | 6.260440 | 0.782555 |
| Total | 9 | 12.36005 | 1.373339 |

Category Statistics

| KODE | Count | Mean | Std. Dev. | Std. Err. of Mean |
|------|-------|----------|-----------|-------------------|
| 0 | 5 | 15.00600 | 1.089211 | 0.487110 |
| 1 | 5 | 13.44400 | 0.615410 | 0.275220 |
| All | 10 | 14.22500 | 1.171895 | 0.370586 |

Berdasarkan hasil pengujian *paired sample t-test* ini bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan persentase kemiskinan yang signifikan antara sebelum adanya program dana desa dan setelah adanya program dana desa.

Selain dari perhitungan *paired sample t-test* tersebut, kita bisa melihat pada gambar 2 dan 3 dimana grafik persentase kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan antara sebelum adanya program dana desa dan setelah adanya program dana desa.

KESIMPULAN

Salah satu tujuan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengucurkan anggaran dana desa bisa dikatakan tercapai melihat adanya perbedaan persentase kemiskinan antara sebelum dan setelah adanya program dana desa, hal ini bisa disebut program dana desa cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Walaupun efek dana desa tidak secara langsung, karena dana desa pada umumnya digunakan untuk kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian,

tentunya kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa" *Jurnal Penelitian Politik 2016 Volume 13 No. 2, 193-211*.
- [2] <https://djk.kemenkeu.go.id>
- [3] <https://www.bps.go.id>
- [4] Kuncoro, Mudjarat. "Metode riset untuk bisnis & ekonomi". Jakarta: Erlangga. (2003).
- [5] Nasehudin, T. S., dan Gozali, N. "Metode Penelitian Kuantitatif". Bandung: Pustaka Setia. (2012).
- [6] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [7] Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- [8] Prawoto, Nano. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* (2009). Volume 9, Nomor 1, 56 – 68
- [9] Sopian, Erik, Navalino, Djoko Andreas dan Sahabuddin, Zainal Abidin. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015 – 2018". *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. (2020), Volume 6 Nomor 2
- [10] Widarjono, Agus. "Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi". Yogyakarta: Ekonesia. (2009).